

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wangari Maathai tidak berdiam diri ketika masyarakat Kenya tidak dapat menikmati sumber daya alam mereka seperti dulu lagi. Maathai yang merupakan tokoh politik dan aktivis lingkungan yang berasal dari suku Kikuyu<sup>1</sup>, melihat penggundulan hutan di Kenya sebagai penyebab penderitaan bagi masyarakat secara menyeluruh. Penggundulan hutan telah merajalela akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak bertanggung jawab, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Daniel Arap Moi pada tahun 1978 – 2002. Pembangunan telah meningkatkan angka kemiskinan masyarakat Kenya yang masih bergantung pada alam (hutan), bukan sebaliknya.

Penggundulan hutan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan pembangunan ini, tidak semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun telah menambah permasalahan menjadi lebih kompleks. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi permasalahan yang krusial bagi masyarakat ketika kehidupannya bergantung pada hutan. Mereka harus mencari kebutuhan hidup jauh dari tempat tinggal mereka karena ketersediaan sumber daya yang sudah berkurang dan semakin jarang ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat kehilangan waktu produktif mereka untuk bekerja dan bersekolah, terutama bagi perempuan, demi mencari kayu bakar, air, dan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Penggundulan hutan, juga berdampak langsung pada sektor pertanian. Penggurunan yang semakin luas mengakibatkan pola musim di Kenya berubah dan sulit ditebak. Hal ini mengakibatkan hasil panen yang tidak memuaskan.

---

<sup>1</sup> Salah satu suku di Kenya.

Sehingga, masyarakat tidak bisa memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan panen dan bahkan mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri dari hasil pertanian.

Kondisi tersebut diperparah dengan buruknya pemerintahan Kenya. Merdeka dari kolonialisme barat tidak berarti masyarakat sepenuhnya merdeka dan bisa meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan yang mereka lakukan sendiri. Masyarakat dihadapkan dengan pemerintah yang korup, tidak demokratis, dan tidak menghormati hak masyarakat, terutama pada perempuan. Sehingga, manfaat pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Daniel Arap Moi kala itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata, bahkan cenderung hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok elite saja. Alhasil, pembangunan yang seharusnya menyejahterakan malah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Sebagai seorang aktivis lingkungan, dari fenomena tersebut Maathai melihat adanya hubungan antara kerusakan lingkungan, kemiskinan, subordinasi perempuan dan perdamaian.<sup>2</sup> Hal itu selanjutnya yang mendasari pemikiran-pemikiran Maathai dan menjadikan Ia dikenal di kalangan internasional sebagai penjuang demokrasi, hak asasi manusia dan konservasi lingkungan. Ia menyuarakan pemikirannya dan berjuang mengatasi permasalahan di negaranya - terutama terkait isu lingkungan - melalui organisasi non-pemerintah Gerakan Sabuk Hijau (*The Green Belt Movement/ GBM*) yang dirintisnya sejak tahun 1977 di Kenya. Gerakan Sabuk Hijau sendiri memfokuskan perhatiannya terhadap penanganan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Organisasi ini sadar bahwa lingkungan memiliki dampak yang sangat besar di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, kelesatarian lingkungan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan menanam pohon yang dapat mencegah

---

<sup>2</sup> Maathai, W. (2012). *Gerakan Sabuk Hijau*. Jakarta Pusat: Marjin Kiri.

kerusakan lingkungan yang sangat mengancam kehidupan manusia. Melihat peluang itu, penanaman pohon dijadikan sebagai aktivitas utama yang digencarkan Gerakan Sabuk Hijau sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan penyebab kemiskinan.

Gagasan- gagasan Wangari Maathai terkait pembangunan yang dituangkan dalam kegiatan- kegiatan di Gerakan Sabuk Hijau, perlahan berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kenya. Terlebih lagi, gagasan Maathai tentang *Three Legged Stool* yang menjadi prinsip fundamental dalam sebuah pembangunan telah menjadikannya sebagai salah satu penerima Penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 2004. Nama Maathai yang semakin terangkat ke panggung internasional, memberinya pijakan yang kuat untuk berkeliling dunia menyebarkan pesan bahwa ekologi dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

Kaitanya dengan gagasan *Three Legged Stool*, Maathai memiliki pandangan yang berbeda terhadap agenda- agenda pembangunan baik yang berskala nasional maupun internasional (global). Selama ini, agenda pembangunan global yang dirancang dengan dalih untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, menurutnya kurang dikaji dengan matang.<sup>4</sup>

Konsesus Washington yang pada awalnya menjadi solusi untuk menangani krisis ekonomi di Amerika Latin, sayangnya berbalik menambah permasalahan menjadi lebih besar. Pada awal tahun 2000 telah terjadi krisis ekonomi global yang melanda Amerika Latin. Agenda pembangunan yang diformulasikan dalam Konsesus Washinton untuk menangani krisis utang Amerika Latin di akhir tahun 1980-an, malah mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi kawasan ini di tahun 2000. Pendekatan neoliberal pada agenda pembangunan itu mengakibatkan dampak yang buruk bagi perekonomian Amerika Latin, seperti harga saham di pasar modal yang

---

<sup>3</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. Hal. 56

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 239

berjatuh, mata uang melemah dan harga komoditas menurun. Turunya kinerja perekonomian Amerika Latin berdampak semakin buruk pada menurunnya pendapatan publik dan perdagangan yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.<sup>5</sup>

Selain Konsesus Washington, Maathai melihat adanya perhitungan yang kurang sempurna dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*.<sup>6</sup> Ketika MDGs diumumkan, beberapa negara terlebih dahulu telah membuat perkembangan dalam mencapai tujuan MDGs dari pada negara yang lain seperti di negara maju. Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan tidak dimulai dari kondisi dan kapasitas negara yang sama, hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan di antara negara- negara yang akan melakukan pembangunan, seperti di Sub-Sahara Afrika yang dalam hal ini sangat jauh tertinggal.

MDGs memang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global. Di akhir tahun 2015, hampir seluruh tujuan MDGs dapat dicapai dengan baik terutama pada pengurangan angka persentase angka kemiskinan global yang menjadi fokus utama agenda ini. Angka kemiskinan global telah berkurang dari 1.9 miliar di tahun 1990 menjadi 836 juta di tahun 2015.<sup>7</sup>

Selain itu, UNICEF melaporkan beberapa capaian yang menunjukkan kondisi masyarakat yang semakin jauh dari kemiskinan. Beberapa indikator menunjukkan hal yang positif, seperti pada peningkatan jumlah anak yang selamat dari penyakit menular dan malnutrisi, perlindungan dari HIV, keamanan belajar di sekolah dan kemudahan mengakses air

---

<sup>5</sup> Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu- Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

<sup>6</sup> Opcit.

<sup>7</sup> Galatsidas, A., & Sheehy, & F. (2016). What have the millennium development goals achieved? Retrieved September 26, 2017, from <http://www.theguardian.com/global-development/datablog/2015/jul/06/what-millennium-development-goals-achieved-mdgs>

bersih. Hal ini semakin meningkatkan optimisme dunia dalam menangani permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dunia.<sup>8</sup>

Namun, perlu disadari bahwa kesuksesan dalam MDGs belum dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah. Masih banyak wilayah yang belum merasakan keuntungan dari MDGs. Kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan masih banyak terjadi. Khususnya di negara-negara yang belum memiliki sektor ekonomi yang kuat seperti negara-negara di Benua Afrika. Seperti yang disampaikan oleh Ban Ki Moon:

*“The MDGs helped to lift more than one billion people out of extreme poverty, to make inroads against hunger, to enable more girls to attend school than ever before and to protect our planet,.....Yet for all the remarkable gains, I am keenly aware that inequalities persist and that progress has been uneven.” – Ban Ki-Moon - Sekreatis Jendral PBB periode 2006- 2016. <sup>9</sup>*

Walaupun persentase angka kemiskinan global berkurang lebih dari setengahnya, namun jika dilihat dari persentase setiap kawasan akan terlihat hasil yang berbeda. Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan tidak terjadi secara menyeluruh di semua kawasan. Di Asia Tenggara berhasil melampaui tujuan pengurangan kemiskinan sebesar 16%. Asia Selatan dapat melampaui target hingga 12,5%. Afrika Utara hanya berkurang sekitar 1,2%. Sub-Sahara Afrika adalah yang paling jauh tertinggal. Bahkan wilayah tersebut tidak memenuhi tujuan pengurangan kemiskinan ekstrim. Secara global angka kemiskinan memang menurun, namun

---

<sup>8</sup> Childs, A. (2015). How the Millennium Development Goals failed the world's poorest children. Retrieved September 27, 2017, from <http://theconversation.com/how-the-millennium-development-goals-failed-the-worlds-poorest-children-44044>

<sup>9</sup> n.n. (2015). Where the Millennium Development Goals a success? Yes! Sort of. Retrieved from <http://www.wvi.org/united-nations-and-global-engagement/article/were-mdgs-success>

belum mampu secara kawasan.<sup>10</sup> Di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, rasio kemiskinan antara wanita dan laki-laki mengalami peningkatan yang mulanya 108 berbanding 100 di tahun 1997 menjadi 117 berbanding 100 di tahun 2012. Hal ini memprlihatkan bahwa wanita masih lebih miskin daripada laki-laki.<sup>11</sup>

Selain masalah kemiskinan, tidak ada negara yang mampu mencapai target pengurangan tingkat kematian ibu dan pengurangan emisi karbon.<sup>12</sup> Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pelaksanaan MDGs yang digagas sejak lebih dari 15 tahun yang lalu, hasilnya masih jauh dari harapan. Kegagalan MDGs tersebut terjadi dalam menekan angka kematian ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur International NGO Forum on Indonesian Development, Sugeng Bahagijo.<sup>13</sup>

Secara global, terdapat beberapa aspek yang masih membutuhkan usaha yang banyak dalam mencapai target-targetnya seperti dalam Ketidaksetaraan jender. Menurut PBB, ketidaksetaraan jender tetap ada meskipun saat ini perwakilan perempuan di parlemen dan anak perempuan yang bersekolah lebih banyak, namun perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam akses pekerjaan, aset ekonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam ranah pribadi dan publik.<sup>14</sup>

Rasio kematian ibu di seluruh belahan mengalammi penurunan yang sangat kecil. Rasio kematian ibu dari wanita

---

<sup>10</sup> Gibbs, D. (2015). MDG Failures. Retrieved September 27, 2017, from <https://borgenproject.org/mdg-failures/>

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Sedayu, A. (2015). Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Butuh Peran Publik. Retrieved September 29, 2017, from <https://nasional.tempo.co/read/703630/program-pembangunan-berkelanjutan-sdgs-butuh-peran-publik>

<sup>14</sup> Opcit.

berusia 15-49 telah berkurang hampir setengahnya sejak tahun 1990. Namun, 510 dari 100.000 perempuan di Afrika Sub-Sahara masih sekarat karena melahirkan setiap tahun atau lebih dari dua kali lipat dari wilayah lain di dunia.<sup>15</sup>

Meskipun MDGs telah berakhir dengan berbagai kegagalan yang dialami, berbagai dukungan dan semangat baru disuarakan dari berbagai pihak untuk menyusun dan melaksanakan agenda pembangunan yang baru. Mereka percaya bahwa agenda pembangunan baru yang disusun dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) mampu menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia dengan pendekatan baru yaitu pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Antonio Guterres, selaku Sekretaris Jendral PBB periode 2017- 2021, sangat mendukung penuh adanya SDGs yang telah menguraikan secara universal, mengintegrasikan dan mentransformasikan cita- cita dunia menuju sebuah dunia yang lebih baik.<sup>16</sup>

Tujuh belas tujuan yang harus dicapai dalam SDGs yang disepakati di tahun 2015 ini, merupakan bentuk komitmen bersama untuk mengurangi angka kemiskinan global dengan melakukan pembangunan secara holistik dan berkelanjutan. Namun, hal tersebut memunculkan berbagai kekhawatiran dari berbagai pihak, baik para peneliti, kelompok kepentingan dan para pemimpin negara, khususnya dari negara yang belum maju. Para peneliti telah menghimbau bahwa banyaknya target dalam SDGs dikhawatirkan akan semakin menyulitkan negara- negara dalam mencapai tujuan pokok SDGs. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kapasitas yang berbeda dalam melaksanakan pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh Charles Kenny, anggota senior Center for Global Development sebuah *think tank group* dari Washington sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> United Nations. (2017). Antonio Guterres and The Sustainable Development Goals. Retrieved September 29, 2017, from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/secretary-general/>

*“Some of the SDGs targets are probably implausible, at least for some countries, for example, for all countries to get down their child mortality as suggested would take rates of progress that are historically unprecedented”.*  
17

Komitmen dan semangat negara- negara di dunia untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan global dibuktikan dengan selalu melakukan pembaharuan dan pengembangan kebijakan- kebijakan dalam agenda pembangunan global. Tantangan penyebab kemiskinan yang semakin kompleks, mengharuskan formula- formula dalam agenda pembangunan memiliki dimensi yang lebih luas dan berkelanjutan. Kaitanya dengan hal tersebut, dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan prespektif Wangari Maathai yang meragukan agenda pembangunan global sebagai jalan yang diagungkan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan perdamaian serta kesejahteraan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

***Mengapa Wangari Maathai mengajukan tawaran “Three Legged Stool” sebagai alternatif pembangunan global?***

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan keraguan Wangari Maathai terhadap wacana agenda pembangunan global

---

<sup>17</sup> Bekker, V. (2015). U.N.’s New SDGs Are Driving the Global Development Agenda. Retrieved September 29, 2017, from <http://www.institutionalinvestor.com/article/3492872/banking-and-capital-markets-emerging-markets/uns-new-sdgs-are-driving-the-global-development-agenda.html?ArticleId=3492872&p=1#.Wc51W2iCzDd>



yang disusun untuk menangani kemiskinan dan kesenjangan global.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Konsep *Counter Discourse*

*Counter Discourse* dalam kamus *oxforddictionaries.com* didefinisikan sebagai sebuah jalan hidup dan sekumpulan sikap- sikap yang menentang atau berbeda dengan norma sosial yang berlaku (*a way of life and set of attitudes opposed to or at variance with the prevailing social norm*). Konsep ini ingin menggambarkan sebuah wacana tandingan dari sebuah wacana yang telah diklaim kebenarannya. Dapat dikatakan bahwa *counter discourse* merupakan sebuah wacana yang kontradiktif dengan wacana yang telah dianggap benar secara umum.

Konsep yang juga sering disebut dengan *counter culture* ini, dipaparkan oleh Michael Foucault. Ia melihat sebuah normalitas sesungguhnya mengandung persoalan. Terciptanya tren atau selera merupakan sebuah definisi dari situasi terhadap kecenderungan perilaku tertentu dari masyarakat. Hal ini mengandung persoalan, karena situasi tersebut mengarahkan manusia pada tindakan atau cara berpikir tertentu atau menciptakan hegemoni. Foucault juga menyebut hal tersebut sebagai dominasi yang dilakukan melalui ideologi atau wacana.<sup>18</sup> Melalui pemahaman tersebut, dengan konsep ini, Foucault ingin menggambarkan sebuah wacana yang melakukan kritik atau penyerangan (*counter-discourse*) terhadap satu wacana yang mengajukan klaim kebenaran (*prior discourse*). Secara formal, hal ini terjadi ketika ada wacana-

---

<sup>18</sup> Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18(1), 75–100.

wacana lain yang mulai berbicara dengan bahasanya sendiri dan memulai untuk menentang kekuasaan yang menekan mereka.<sup>19</sup>

Dari pemaparan Foucault tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Suatu kebenaran dapat digantikan dengan kebenaran yang lain dan hal tersebut akan terus terjadi ketika kebenaran yang baru memiliki landasan yang lebih kuat. Hal ini akhirnya memunculkan sebuah *counter discourse* atau wacana tandingan yang menolak wacana dominasi yang akan menciptakan sebuah persaingan untuk menjadi yang paling benar. Foucault percaya bahwa wacana berupa gagasan, praktik sosial dan tradisi yang mendominasi dalam masyarakat akan digantikan dengan wacana yang baru, ketika wacana baru tersebut dianggap lebih benar karena memiliki dasar yang lebih kuat, maka wacana tersebut akan dijadikan sebagai sebuah wacana tandingan.

Agenda pembangunan global, seperti MDGs dan SDGs, telah diklaim menjadi sebuah komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan di setiap negara untuk menangani tantangan global yang semakin kompleks. Kesepakatan itu dilaksanakan dalam rangka menciptakan dunia yang damai dan sejahtera (*prior discourse*). Formula- formula pembangunan disusun dengan melibatkan banyak aspek yang semakin luas guna menangani permasalahan yang semakin kompleks seperti kemiskinan dan kesenjangan global. Namun, menurut Wangari Maathai, agenda pembangunan global yang disusun kurang dikaji dengan matang. Alhasil, tidak semua negara mampu mencapai tujuan- tujuan yang ada dalam agenda pembangunan global tersebut.

Dengan prinsip bangku berkaki tiga (*Three Legged Stool*) yang merupakan prinsip fundamental dalam sebuah pembangunan, Maathai menawarkan solusi yang menjadi

---

<sup>19</sup> Moussa, M., & Scapp, R. (1996). The Practical Theorizing of Michel Foucault : Politics and Counter-Discourse : Cultural Critique , No . 33 ( Spring , 1996 ) , pp . 87-112 Published by : University of Minnesota Press Stable URL : [http://www. Cultural Critique, 33\(33\), 87–112.](http://www. Cultural Critique, 33(33), 87–112.)

alternatif atas kegagalan dalam yang terjadi dalam agenda pembangunan global (*counter discourse*). Dalam konsep tersebut, Maathai menekankan adanya kestabilan dan integrasi antara demokrasi, pengelolaan lingkungan dan perdamaian. Meskipun beberapa formula dalam agenda pembangunan global yang telah disusun ada yang mengandung prinsip- prinsip tersebut, namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan secara seimbang dan bersinergi. Memiliki bangku yang stabil berarti menjamin sebuah pembangunan yang holistik; menempatkan pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia atau hak yang lainnya sebagai sebuah prioritas; penggunaan semua sumber daya yang adil, bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan mengelola urusan negara dengan cara yang bertanggung jawab. Ketika semua aspek tersebut berada pada tempatnya, negara akan memiliki stabilitas, perdamaian, dan pembangunan.<sup>20</sup>

## **2. Konsep Pembangunan (Wangari Maathai)**

Wangari Maathai memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembangunan. Menurut Maathai, pembangunan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan dan memungkinkan untuk mengekspresikan kreativitas dan rasa kemanusiaan secara penuh.<sup>21</sup> Oleh karena itu, menjadi hal yang penting untuk memperluas kebebasan dan penghormatan terhadap hak- hak secara nyata dan harus dirasakan oleh masyarakat jika ingin mencapai tujuan tersebut. Maathai menambahkan, hal tersebut harus beriringan dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan penciptaan budaya damai demi mencapai kesejahteraan yang sebenarnya dalam sebuah pembangunan.

Maathai juga menambahkan, bahwa pembangunan bukan hanya sebatas mengenai pertumbuhan ekonomi saja, melainkan harus mencakup segala aspek kehidupan manusia.

---

<sup>20</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. Hal. 58

<sup>21</sup> Ibid.

Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pengakuisisian sebuah materi, meskipun setiap orang harus hidup bermartabat dan tidak merasa takut akan kelaparan atau menjadi tunawisma. Sebenarnya Maathai tidak sepenuhnya ketat terhadap hal tersebut, semua sistem politik, lembaga- lembaga negara dan nilai- nilai kebudayaan serta arah dan indikator yang menuju pertumbuhan ekonomi dapat dibenarkan sejauh mereka mendorong kebebasan dasar (*basic freedom*), termasuk hak asasi manusia, dan kesejahteraan baik individu maupun kolektif.<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan formula yang dapat menciptakan pembangunan dengan kebijakan pembangunan yang holistik dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, menurut Maathai, pembangunan haruslah lebih menekankan pada kestabilan antara perdamaian, demokrasi dan pengelolaan lingkungan. Konsep- konsep tersebut merupakan prinsip yang fundamental dalam melaksanakan pembangunan. Gagasan tersebut berakar dari ketika Maathai melihat masyarakat Kenya, yang mengalami penderitaan akibat deforestasi untuk pembangunan. Selanjutnya, gagasannya semakin diperkuat dan diperjelas Maathai ketika ia mampu menghubungkan konsep- konsep dari Panitia Nobel Norwegia terkait arti dari perdamaian yang menjadikan Maathai mendapat Penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 2004. Ketika itu, Panitia Nobel Norwegia menantang dunia untuk memperluas pemahaman tentang perdamaian, mereka menyampaikan bahwa:

*“Tidak akan ada perdamaian tanpa pembangunan yang adil dan tidak akan ada perdamaian tanpa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam ruang lingkup demokrasi”.*<sup>23</sup>

Hubungan antara perdamaian, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan *good governance* - yang dibuat oleh

---

<sup>22</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. Hal. 56

<sup>23</sup> Maathai, W. (2012). *Gerakan Sabuk Hijau*. Jakarta Pusat: Marjin Kiri. hal. 134

Panitia Nobel Norwegia ini, menurut Maathai, mengharuskan umat manusia perlu memikirkan kembali arti perdamaian dan keamanan untuk mencapai perdamaian dunia. Hal tersebut akan dicapai dengan beberapa hal yang harus dilakukan, seperti mengatur perdamaian dan keamanan secara demokratis, menghormati peraturan, hukum dan hak asasi manusia, mendorong keadilan dan kesetaraan secara nyata dan sadar serta mengelola sumber daya yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya - tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi mendatang.<sup>24</sup>

Untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan konsep- konsep tersebut, Maathai menggunakan metaphora yang terinspirasi dari bangku tradisional Afrika yang memiliki tiga kaki (*Three Legged Stool*). Ketiga kaki tersebut merepresentasikan tiga pilar utama untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan stabil.<sup>25</sup> Selanjutnya bangku yang ditopang dengan pilar tersebut, akan merepresentasikan sebuah masyarakat dengan prospek pembangunan yang stabil. Namun, ketika salah satu kaki itu hilang, maka bangku tersebut akan tidak stabil, yang berarti ketidakstabilan dan kegagalan pembangunan dalam negara akan terjadi.

Pilar- pilar dalam *Three Legged Stool* tersebut menjadi hal yang fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Pilar- pilar tersebut yaitu, adanya ruang demokrasi; pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan baik untuk sekarang maupun masa depan secara adil dan merata; dan adanya budaya damai (*cultures of peace*).<sup>26</sup> Adanya ruang demokrasi di dalam negara ketika melaksanakan pembangunan sangat penting bagi Wangari Maathai. Demokrasi yang Maathai maksud lebih kepada penghormatan dan menjunjung tinggi berbagai hak, baik itu hak asasi manusia, hak wanita, hak anak, hak lingkungan dan lain sebagainya. Jika telah memiliki tata

---

<sup>24</sup> Maathai, W. (2008). *Unbowed*. London: Anchor Book. Hal.294

<sup>25</sup> Maathai, W. (2010). *The Challenge for Africa*. New York: Anchor Book. hal. 56-57.

<sup>26</sup> Ibid.

kelola yang demokratis, maka masyarakat dan pemerintah mampu mendorong terselenggaranya budaya damai, sehingga masyarakat dapat menemukan sebuah lingkungan yang damai untuk melaksanakan aktivitas mereka.<sup>27</sup> Proses pembangunan yang dilakukan-pun dapat lebih menjamin hak-hak masyarakat. Dengan demikian, negara yang demokratis merupakan negara yang mampu menjalankan pembangunan dengan baik.

Ketika keberlanjutan menjadi salah satu syarat pembangunan, maka perhatian terhadap kondisi lingkungan tidak dapat dihiraukan dari syarat sebuah agenda pembangunan. Oleh karena itu, pilar kedua yang ditawarkan Maathai dalam *Three Legged Stool* yaitu pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, menjadi hal yang penting dalam sebuah pembangunan. Maathai melihat antara pembangunan dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal tersebut haruslah seimbang jika ingin mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang dikatakan Maathai:

*“I often asked whether a trade-off is required between the environment and development. I always say no. We need and must have both; what is important is a good balance between the two”.*<sup>28</sup>

Dengan adanya keseimbangan tersebut, manfaat dari pembangunan dapat dirasakan baik untuk kehidupan sekarang maupun masa depan yang dilakukan secara adil dan pantas, termasuk untuk masyarakat terpinggir.

Kaki ketiga dalam *Three Legged Stool* adalah budaya damai (*culture of peace*), dimana hal ini terdiri dari adanya keadilan, penghormatan, perasaan keharuan, kemauan untuk memaafkan dan balas budi. Budaya damai sangat dibutuhkan

---

<sup>27</sup> Maathai, W. (2006). Sustained Development, Democracy, and Peace in Africa. Retrieved October 5, 2017, from <http://www.greenbeltmovement.org/wangari-maathai/key-speeches-and-articles/sustained-development-democracy-and-peace%0A>

<sup>28</sup> Opcit. Hal 250

untuk menciptakan situasi aman dan stabil dalam negara. Ketika setiap masyarakat dan pemerintah dapat saling menghargai satu sama lain, maka akan tercipta perasaan aman dalam menjalankan aktivitas pembangunan. Hal ini menjadikan masyarakat lebih kreatif dan produktif. Terlebih lagi dengan situasi tersebut, masyarakat akan mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, karena mereka merasa dihargai dan sadar jika pembangunan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik secara holistik dan berkelanjutan.

Maathai menekankan kembali bahwa ketiga aspek tersebut haruslah berjalan seimbang dan terintegrasi. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kegagalan dalam pembangunan akan terjadi dan memperburuk kondisi negara, seperti timbulnya ketidakstabilan negara. Setiap pilar disusun untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga setiap permasalahan harus diselesaikan secara bersama- sama dan simultan. Ketika semua segi tersebut berada pada tempatnya, negara akan memiliki stabilitas, perdamaian, dan pembangunan.<sup>29</sup>

Penyebab kemiskinan dan kesenjangan yang menjadi tantangan agenda pembangunan global dari waktu ke waktu menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan agenda pembangunan dengan kebijakan didalamnya yang holistik dan berkelanjutan agar permasalahan tersebut bisa ditangani dengan baik. Bukan hanya menilai kesuksesan pembangunan dari satu aspek saja, seperti pertumbuhan ekonomi, namun juga perlu melihat aspek- aspek yang lain secara seimbang dan saling terintegrasi seperti dalam perluasan kebebasan dan penghormatan hak- hak masyarakat, kelesatarian lingkungan dan budaya damai yang menjadi hal- hal fundamental dalam mencapai pembangunan yang lebih demokratis.

---

<sup>29</sup> Ibid. Hal 58

## **E. Argumen Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini membahas mengenai:

Pertama, melalui konsep *counter discourse*, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa Wangari Maathai ingin mengajukan pandangan baru terhadap pembangunan global yang dianggap lebih demokratis.

Kedua, penelitian ini ingin menunjukkan posisi pemikiran *Three Legged Stool* dari Wangari Maathai dalam wacana pembangunan global.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut didukung dengan data- data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka. Dengan demikian, jenis data yang akan didapatkan dan digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, buku, majalah, laporan, jurnal ilmiah, naskah deklarasi, berita *online*, situs- situs internet serta sumber- sumber lain baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada wacana- wacana agenda pembangunan global yang telah disusun yaitu Konesus Washington, MDGs hingga SDGs.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



## **1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, argumen penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

## **2. Bab II Perkembangan Wacana Pembangunan Global**

Bab ini akan berisikan mengenai pemaparan mengenai perkembangan agenda pembangunan dari waktu ke waktu. Dimulai dari pemaparan mengenai Konesus Washington, dilanjutkan pemaparan mengenai MDGs hingga terbentuknya agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

## **3. Bab III *Three Legged Stool* Melihat Wacana Pembangunan Global**

Pada bab ini penulis akan memaparkan pandangan Wangari Maathai melalui konsep *Three Legged Stool* terhadap wacana pembangunan global yang telah disusun dan kemudian akan dipaparkan pula tawaran Wangari Maathai mengenai formula pembangunan global baru yang dianggap lebih demokratis.

## **4. Bab IV Penutup**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pemaparan bab- bab sebelumnya.